

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Kabupaten kutai Kartanegara pada setiap akhir tahun anggaran, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk dilaporkan kepada Bupati Kutai Kartanegara Melalui Bagian Ortal Sekretariat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan analisis realisasi kinerja capaian sasaran strategis Inspektorat Kabupaten kutai Kartanegara, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang kita lakukan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten kutai Kartanegara Tahun 2013 ini, kita harapkan agar terjadi optimalisasi peran Inspektorat dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Kabupaten kutai Kartanegara pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Inspektorat Kabupaten kutai Kartanegara secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Selama tahun 2013, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun 2013 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013.

Lakip Inspektorat Kukar 2013

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan , namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektorat.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita bersama terutama seluruh pegawai pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka self evaluation dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Tenggarong, Januari 2014

INSPEKTUR
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DRS. H. MACHMUDAN, M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19710305 199202 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur staf dalam struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dimana dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintahan Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara langsung dikoordinasikan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

Untuk itu, seluruh peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2010-2015, Kontrak Kinerja (Penetapan Kinerja) serta Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2010-2015 telah di reviu sehingga dapat dilakukan secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pengawasan yang profesional.	1. Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP sesuai dengan rekomendasi	80 % 80%
		2. Jumlah sarana dan prasarana IT	85
		3. Jumlah peralatan uji untuk pemeriksaan	
		4. Jumlah kelengkapan penunjang pengawasan lainnya	
		5. Jumlah Auditor yang bersertifikasi	35 Orang
		6. Jumlah P2UPD yang bersertifikasi	23 Orang
		7. Jumlah aparatur pengawas yang mempunyai kompetensi	12 Orang
2	Meningkatkan peran serta stakeholder/Masyarakat dibidang pengawasan	Prosentase pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat	50 %
3	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Opini BPK RI Terhadap LKPD	WDP
		2. Prosentase penetapan system pengendalian Intern SKPD	15 %
		3. Peringkat Evaluasi LPPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tingkat Propinsi Kaltim	3
		4. Nilai rata-rata hasil evaluasi Lakip SKPD	C
		5. Score nilai rata-rata akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	B

Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan dapat dicapai dengan baik dan capaian tersebut lebih baik dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2012.

Sekalipun capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013 lebih baik dari tahun 2012 namun terdapat beberapa hal strategis yang perlu mendapat perhatian khusus pada masa yang mendatang yaitu meningkatkan Opini menjadi WTP Clear and Clean atau mempertahankan opini WTP Dengan Paragraf Penjelas dari BPK yang sebelumnya kita mendapat Discleamir.

Sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2013 menggunakan dana sebesar Rp.20.495.841.731,- atau 63 % dari anggaran sebesar Rp.32.391.801.787,-. Realisasi Anggaran sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan sebesar Rp.60.256.030,-bila dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp. 19.893.281.438,-

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur staf dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara langsung dikoordinasikan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015, memuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas kinerja keuangan sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Lakip Inspektorat Kukar 2013

Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 yang berpedoman pada Inspres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2013 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun yang akan datang.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 mengacu pada:

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan KKN;
5. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Permenpan No 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Bab IV tentang Kedudukan, tugas dan fungsi perangkat Daerah Kabupaten/Kota bagian ketiga Pasal 12 ayat (5) yang berbunyi Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota dan secara teknis

Lakip Inspektorat Kukar 2013

administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Hal ini dikuatkan lagi dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2012 pada Bab II Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 2 yang menyatakan "Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah".

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah NO 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara serta Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, Bab II Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 3 yang berbunyi "Inspektorat Kabupaten dalam menjalankan tugas pokok melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten serta atas penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa".

b. Fungsi

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai fungsi :

- a. Menyusun perencanaan program pengawasan;
- b. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan Pemerintahan Desa.
- d. Melaksanakan reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah dan evaluasi kinerja;
- e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan Pemerintahan Desa;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;
- g. Melaksanakan pelayanan teknis administratif dan fungsional; dan
- h. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan Inspektorat;

1.3.3. Susunan Organisasi dan Personil

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah Nomor 10 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara serta Peraturan Bupati *Lakip Inspektorat Kukar 2013*

Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun struktur organisasi Inspektorat Kutai Kartanegara sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2012 tersebut antara lain :

- a. Inspektur.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan ;
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
- h. Kelompok Jabatan P2UPD.

Sedangkan jumlah pegawai pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara 2013 adalah sebanyak 112 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai (PNS)
Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Inspektur	1 Orang
2	Sekretaris	1 Orang
3	Inspektur Pembantu	4 Orang
4	Kepala Sub Bagian	3 Orang
5	Jabatan Fungsional Auditor	25 Orang
6	Jabatan Fungsional P2UPD	15 Orang
7	Jabatan Fungsional Umum	44 Orang
JUMLAH		93 Orang

Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian Inspektorat : 2013

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat /	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Tk. I	IV/b	5 Orang
2	Pembina	IV/a	9 Orang
3	Penata Tk. I	III/d	19 Orang
4	Penata	III/c	13 Orang
5	Penata Muda Tk. I	III/b	18 Orang
6	Penata Muda	III/a	8 Orang
7	Pengatur Tk. I	II/d	- Orang
8	Pengatur	II/c	1 Orang
9	Pengatur Muda Tk. I	II/b	13 Orang
10	Pengatur Muda	II/a	7 Orang
11	Juru	I/c	- Orang
	THL	-	19 Orang
JUMLAH			112 Orang

Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian Inspektorat : 2013

1.4 Aspek Strategik yang Berpengaruh

Aspek strategik Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja, terdiri dari sejumlah kekuatan dan kelemahan serta peluang dan hambatan baik berasal dari faktor internal maupun eksternal Organisasi Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Unsur Kekuatan

- 1) Adanya peraturan di bidang pengawasan;
- 2) Tersedianya sumber daya manusia aparatur pengawas;
- 3) Adanya motivasi kerja Pegawai Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yang tinggi;
- 4) Alokasi anggaran pengawasan yang cukup besar;

b. Unsur Kelemahan

- 1) Kualitas masih belum merata;
- 2) Kuantitas sumber daya manusia aparatur pengawas masih belum sesuai dengan besarnya jumlah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
- 3) Sarana dan prasarana pendukung pemeriksaan belum sesuai dengan jumlah SKPD yang menjadi objek pemeriksaan;
- 4) Anggaran yang telah dialokasikan belum maksimal dilaksanakan yang disebabkan yang ditunjuk sebagai PPTK juga sebagai pemeriksa.

2. Faktor Eksternal

a. Unsur Peluang

- 1) Dukungan dari atasan langsung;
- 2) Dukungan kerjasama dengan lembaga pengawas lainnya (APIP) :
Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, Inspektorat Jenderal, BPK, dan
BPKP;
- 3) Tuntutan reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah;

b. Unsur Ancaman

- 1) Pengaruh politis dalam upaya penegakan hukum;
- 2) Tidak konsistennya beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan
dari Pemerintah Pusat dalam konteks otonomi/ kewenangan daerah;

1.5 Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang kami susun memiliki dua fungsi yaitu :

Lakip Inspektorat Kukar 2013

1. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh stakeholders;
2. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dua fungsi utama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh setiap Instansi Pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2013. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauhmana visi, misi, program dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2013.
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 sebagai sarana pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan,

manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategik Tahun 2011-2015

2.1.1 Visi dan Misi

2.1.1.1 Visi

Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai internal/fungsional Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan secara langsung dikoordinasikan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Aparatur Pengawas bertanggung jawab secara berjenjang kepada Bupati Kutai Kartanegara dengan prinsip dalam melaksanakan tugas berpegang terhadap kemandirian serta menjunjung tinggi etika dan moral, sehingga dapat bertindak objektif untuk mencapai hasil yang maksimal harus didukung oleh aparatur pengawas yang memiliki dedikasi yang akuntabel serta teruji dibidangnya (profesional).

Adapun Visi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

“Pengawasan yang Profesional Menuju Pelaksanaan Good Governance”.

maka diharapkan agar semua aparatur pengawas dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara objektif, tangguh dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang menjadi tanggung jawabnya serta mempertanggungjawabkan hasil yang telah dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.

2.1.1.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka perlu disusun Misi yang merupakan rumusan masalah mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bayangan kondisi pengawasan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2011-2015 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatkan Pengawasan yang Profesional.
3. Meningkatkan peran serta stakeholder/ masyarakat di bidang pengawasan

2.1.1.3 Tujuan

Pengawasan sebagai tolak ukur sangat relevan dengan fungsi dan manajemen diklat dari eksestensinya akan sangat berperan sebagai alat pengendali setiap pelaksanaan kegiatan dimasing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah diawali dengan proses perencanaan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, maka tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan yang profesional.
2. Mewujudkan aparatur yang memiliki komitmen dalam melaksanakan arah kebijakan organisasi.
3. Meningkatkan peranan pengawasan masyarakat terhadap kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

2.1.1.4 Sasaran

Adapun sasaran untuk mewujudkan visi, misi serta tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
3. Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawas
4. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan
5. Meningkatnya Kesejahteraan Aparatur Pengawasan
6. Meningkatnya peran serta stakeholder/ masyarakat dalam pengawasan

2.1.1.5 Strategi

Prestasi kerja merupakan indikator kinerja pemerintahan sebagai fokus utama pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara. Prioritas yang dilakukan adalah :

1. Melaksanakan dan mengikutsertakan aparatur pengawasan dalam pendidikan dan pelatihan pengawasan.
2. Mengikutsertakan aparatur dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam bidang pengawasan baik pusat maupun daerah.
4. Pemenuhan kebutuhan fasilitas kerja bagi aparatur pengawasan dalam mendukung kegiatannya.
5. Melaksanakan fungsi pengawasan yang independen dan akuntabel.
6. Melaksanakan fungsi pengawasan masyarakat.
7. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi hasil pengawasan serta informasi masyarakat.
8. Memberikan rekomendasi berkaitan dengan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Terwujudnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap bawahannya.

2.1.1.6 Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun langkah-langkah melalui tahapan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam periode 5 (lima) tahun kedepan yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan Publik, meliputi :
 - a. Memberikan asistensi/pembinaan terhadap unit satuan kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam upaya meningkatkan system akuntabilitas.
 - b. Melakukan pembinaan terhadap unit satuan kerja melalui pelaksanaan pengawasan.
2. Kebijakan Teknis, meliputi :
 - a. Kebijakan perencanaan kegiatan pengawasan tahunan
 - b. Kebijakan operasional pengawasan.
 - c. Pendampingan
 - d. Kebijakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
 - e. Kebijakan informasi hasil pengawasan.
 - f. Kebijakan penanganan kasus.

3. Kebijakan sarana dan prasarana, meliputi :
 - a. Kebijakan pemanfaatan sarana dan prasarana
 - b. Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas, sarana dan prasarana system pengawasan.
4. Kebijakan aparatur pengawasan, meliputi :
 - a. Kebijakan pengembangan pegawai dibidang pengawasan.
 - b. Kebijakan pembinaan moral pegawai.
 - c. Kebijakan peningkatan kesejahteraan pegawai.
 - d. Kebijakan penghargaan dan sanksi.
5. Kebijakan pelayanan masyarakat, meliputi :
 - a. Kebijakan penanganan kasus pengaduan masyarakat.
 - b. Kebijakan pengembangan pengawasan masyarakat.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2013

Adapun upaya untuk mencapai sasaran, Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2013 merencanakan program dan kegiatan serta menetapkan indikator kinerja dalam pencapaian Sistem Pengendalian Manajemen (SPM). Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1. Program Utama

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.

- a. Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
- b. Kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah.
- c. Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan
- d. Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
- e. Kegiatan Penyelesaian Kasus TP-TGR.
- f. Kegiatan Pakta Integritas
- g. Kegiatan Evaluasi LPPD SKPD dan Pemda
- h. Kegiatan Evaluasi Lakip SKPD dan Pemda
- i. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
- j. Kegiatan Pemetaan SPIP
- k. Kegiatan Gelar Pengawasan Hasil-Hasil Pengawasan
- l. Kegiatan Tindak Lanjut Evaluasi Lakip dilingkungan Pemkab Kutai Kartanegara
- m. Sosialisasi Perbup SPIP
- n. Pengawasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas.

- a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
- b. Pelatihan Pemeriksaan Simda.
- c. Dikat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- d. Sosialisasi dan Bimtek Penilaian Mandiri dan Reformasi Birokrasi.
- e. Sosialisasi dan Penyampaian Pajak dan LP2P.
- f. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Bidang Pengembangan Keahlian Pengawasan.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor.
- b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- d. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
- e. Kegiatan pembuatan bulletin pengawasan internal.

4. Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat.
- b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- c. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
- d. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan.
- e. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
- f. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor.
- g. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- h. Kegiatan penyediaan komponen alat listrik /penerangan bangunan kantor.
- i. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan.
- j. Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
- k. Kegiatan makanan dan minuman
- l. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- m. Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi Teknis Perkantoran

5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

- b. Kegiatan Workshop Penilaian Angka Kredit.
- c. Kegiatan Sosialisasi Zona Integritas Kabupaten Kutai Kartanegara.
- d. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD di Lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara.

6. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kegiatan penyusunan system informasi terhadap layanan publik.

7. Pengembangan Komunikasi, Informasi Manajemen Pengawasan

Kegiatan pengelolaan dan penataan arsip SKPD

Empat program utama yang dilaksanakan telah sejalan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2010- 2015 Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara telah reuiu sedangkan program yang lain merupakan program penunjang daripada program utama.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Dalam kurun waktu tahun 2013 dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menekan penyimpangan serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan menetapkan 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai. Ke tiga sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 13 indikator kinerja dan 14 target kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa 3 sasaran yang masuk dalam pelaksanaan sesuai dengan program, sedangkan dari 13 indikator kinerja dengan 13 target kinerja terdapat 4 (empat) target indikator kinerja pencapaiannya berhasil dan 9 (sembilan) target indikator kinerja tidak tercapai targetnya.

Untuk dapat mengukur kinerja yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sebagai data pembandingnya antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat di lihat sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja
Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2013

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persen
1.	Meningkatkan Pengawasan yang Profesional	1. Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	80 %	109 tindak lanjut	53 %
		Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP sesuai dengan rekomendasi.	80 % 25 perkara	1.365 tindak lanjut	90%
		Jumlah Sarana dan Prasarana IT	85	10 Unit	11%
		Jumlah Peralatan Uji untuk Pemeriksaan			
		Jumlah Kelengkapan Penunjang Pengawasan		48	56 %
		Jumlah Auditor yang Bersertifikat	35 orang	3	8%
		Jumlah P2UPD yang Bersertifikat	23 orang	1	4%
		Jumlah Aparatur Pengawasan yang mempunyai Kompetensi	12 orang	48	100%
2.	Meningkatkan Peran Serta Stakeholder/Masyarakat	Prosentase Pengaduan dan penyelesaian Pengaduan	50 %	5	100%
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Opini BPK RI terhadap LKPD	WDP	WTP	100%
		2. Prosentase penetapan system pengendalian Intern SKPD	15 %	12	80 %
		3. Peringkat Evaluasi LPPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tingkat Propinsi Kaltim	3	2	66%
		4. Nilai rata-rata hasil evaluasi Lakip SKPD	C	C	
		5. Score Nilai rata-rata Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	B	CC	100%
				80 %	

3.1 Evaluasi dan Analisis capaian kinerja.

Sasaran 1	:	Meningkatkan Pengawasan yang Profesional
------------------	----------	---

1. Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP sesuai dengan rekomendasi

Selain pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, ada juga pengawasan yang dilakukan oleh Instansi Pusat maupun Propinsi. Instansi pusat tersebut adalah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Timur maupun dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur. Sedangkan dari Propinsi adalah Inspektorat Propinsi Kalimantan Timur yang mengawasi pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten/Kota se propinsi Kalimantan Timur.

Dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Timur ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang langsung menjadi pengawasan instansi tersebut. Dan hasil dari pemeriksaan pengawasan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Timur tersebut pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 3.2
 Hasil Temuan dari BPK Perwakilan Kalimantan Timur
 Periode tahun 2010 s.d 2012

No	Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Yang Ditindaklanjuti	Sisa Rekomendasi
1	2010	24	75	47	28
2	2011	24	56	43	13
3	2012	28	73	19	54

Sumber : Sub Bag. Evaluasi dan Pelaporan Hasil Rekonsiliasi TL-HP BPK RI Semester II tahun 2013

Tabel. 3.3
 Hasil Temuan dari APIP Kabupaten Kutai Kartanegara
 Periode tahun 2010 s.d 2013

No	Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Yang Ditindaklanjuti	Sisa Rekomendasi
1	2010	493	504	510	105
2	2011	505	494	558	97
3	2012	396	425	297	146
4	2013	75	88	0	88

Sumber : Sub Bag. Evaluasi dan Pelaporan

Dari data diatas dapat dilihat bahwa hasil temuan dari BPK Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2012 mengalami kenaikan jumlah temuan dan pengawasan APIP masih perlu penanganan yang lebih insentif lagi dari temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur ini banyak menitikberatkan kepada kasus-kasus yang dinilai oleh BPK Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur berindikasi penyimpangan,

temuan yang dari pengawasan menitik beratkan pada perbaikan administrasi pengelolaan keuangan dan aset.

Sesuai rekomendasi yang diberikan oleh BPK Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur tersebut, ada beberapa rekomendasi yang telah ditindak lanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Bahkan ada beberapa kasus yang ditemukan oleh BPK Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur tersebut yang berujung di pengadilan karena penyimpangan yang dilakukan sudah melampaui batas kewajaran sehingga merugikan negara/daerah.

Namun demikian tindak lanjut atas rekomendasi hasil BPK dan APIP Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara kegiatan yang dilakukan pada tahun 2012 belum sepenuhnya memberikan kontribusi dalam penilaian BPK. Pada tahun 2014 Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara akan melakukan upaya perbaikan opini laporan keuangan menjadi lebih baik dan menyelesaikan temuan kerugian Negara melalui program.

- a. Melakukan monitoring dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dengan cara jemput bola ke SKPD yang belum ditindak lanjut secara periodik mingguan, bulanan, dan pertriwulan sampai rekomendasi ditindak lanjuti oleh obrik dan melakukan pemutahiran data.
- b. Melalui kegiatan TP-TGR dimana akan merumuskan penyelesaian kerugian Negara.
- c. Melalui gelar pengawasan untuk menindak lanjut hasil pengawasan APIP

2. Jumlah Prasarana dan Sarana IT

Pada tahun 2013 Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISAS I	%
1. Jumlah sarana dan prasarana IT	80	10	

Analisis atas Pencapaian Indikator kinerja sasaran ini terdapat dalam program dan kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, berupa pengadaan Naote Book sebanyak 10 Unit.

3. Jumlah Peralatan Uji untuk Pemeriksaan

Pada tahun 2013 Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISAS I	%
2. Jumlah peralatan uji untuk pemeriksaan	80	0	

Analisis atas Pencapaian Indikator kinerja sasaran ini terdapat dalam program dan kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan berupa alat uji pemeriksaan terkendala dengan terbatasnya pihak penyedia alat uji pemeriksaan di Kalimantan Timur, penyedia hanya berada diluar kalimantan timur. sehingga pelaksanaan pengadaan alat uji pemeriksaan menjadi kurang

maksimal. Pengadaan alat uji pemeriksaan akan dianggarkan kembali pada tahun 2014.

4. Jumlah Kelengkapan Penunjang Pengawasan

Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melengkapi kelengkapan penunjang pengawasan lainnya dengan memprogramkan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor.
2. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran
4. Kegiatan penyediaan surat menyurat
5. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
6. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
7. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
8. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
9. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
11. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
13. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
14. Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi Teknis Perkantoran

15. Kegiatan Penyusunan RKA SKPD

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1. Jumlah kelengkapan penunjang pengawasaan lainnya	80	48	56%

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan 15 kegiatan ini hanya meliputi 1 indikator kinerja dengan tingkat capaiannya 66 % dimana semua kegiatan ini untuk menunjang kegiatan dalam operasional baik masalah kesekretariatan dan peroses pelaksanaan pengawasaan

5. Jumlah Auditor yang bersertifikat

Untuk meningkatkan kompetensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara memprogramkan peningkatan profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasaan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1. Jumlah Auditor yang bersertifikasi	35	3	8%

Pada tahun 2012 Auditor sebanyak 20 dan tahun 2013 ada penambahan auditor yang telah diusulkan menjadi pejabat pengawas auditor 3 orang dan yang mengikuti sertifikasi dan lulus sebanyak 7 orang namun belum mengusulkan, namun pada tahun 2014 ini ke 7 Orang ini akan diusulkan sehingga total jumlah Auditor yang telah bersertifikasi adalah sebanyak 30 orang.

6. Jumlah P2UPD yang bersertifikat

Untuk meningkatkan kompetensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara memprogramkan peningkatan profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan melalui pembentukan P2UPD melalui jalur inpassing, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1. Jumlah P2UPD yang bersertifikasi	23	1	4 %

Pada tahun 2014 Jumlah P2UPD 14 orang dan tahun 2013 ada penambahan P2UPD sebanyak 1 Orang dimana masuk dalam Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan untuk Inspektorat sehingga capaian Aparat pengawas Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara bertambah 15 orang. Ini dikarenakan kriteria untuk diusulkan kedalam pejabat pengawas tersebut belum memenuhi.

7. Jumlah Aparatur Pengawasan yang mempunyai kompetensi

Untuk meningkatkan kompetensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara memprogramkan peningkatan profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1. Jumlah aparatur pengawas yang mempunyai kompetensi	12	48	100%

Pada tahun 2013 Inspektorat untuk meningkatkan kompetensi tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas urusan pemerintah Daerah dan Auditor dengan mengikut sertakan dalam Diklat dan Bimbingan Teknis sebagai berikut :

- a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
- b. Pelatihan Pemeriksaan Simda.

Dari kegiatan pelatihan ada beberapa diklat yang diikuti Bimtek Evaluasi Lakip, SPIP, LPPD, bahkan untuk meningkatkan kompetensi APIP Inspektorat melakukan diklat khusus tentang reuiu laporan keuangan pemerintah Daerah yang berkerjasama dengan Universitas Gaja mada di Yogyakarta dan Diklat Akuntansi Keuangan Tingkat Dasar di STAN Pelatihan SIMDA Keuangan yang berkerjasama dengan BPKP Perwakilan Kalimantan Timur, ujian sertifikasi Auditor Ahli maupun Ketua Tim. Ini adalah upaya-upaya untuk Aparat Pengawas Intern dapat mengimplentasikan ilmu yang didapat dari Bimtek diatas dengan dapat mengevaluasi LAKIP, LPPD, Mereviu LKPD, Dana Bos, Reguler dan Kasus serta Monitoring tindak lanjut.

Sasaran 2	:	Meningkatkan peran serta stakeholder/masyarakat di bidang pengawasan
------------------	----------	---

Prosentase Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperlukan tindakan pengawasan dalam hal pengaduan kasus untuk menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penanganan kasus yang dimaksud adalah pengaduan masyarakat atau laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, adapun indikator kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Prosentase Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan	50	5	100%

Dalam pelaksanaan kasus pengaduan telah menghasilkan keluaran (output) telah terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat sejumlah 5 (lima) kasus.

Adapun hambatan (permasalahan) yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sulitnya menyesuaikan jadwal pemeriksaan kasus dengan jadwal pemeriksaan reguler dan jadwal kegiatan lain.

Sasaran 3	:	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
------------------	----------	---

Untuk meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara memprogramkan peningkatan sistem

pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah melalui 5 (lima) kegiatan, antara lain :

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala
2. Pemetaan SPIP
3. Sosialisasi SPIP
4. Evaluasi LPPD dan PEMDA
5. Evaluasi LAKIP SKPD dan PEMDA

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2013		
	TARGET	REALISASI	%
Opini BPK RI terhadap LKPD	WDP	WTP	100
Prosentase Penetapan System Pengendalian Intern SKPD	15%	12%	80
Peringkat Evaluasi LPPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tingkat Propinsi Kaltim	3	2	100
Nilai rata – rata Hasil Evaluasi LAKIP SKPD	C	C	100
Score Nilai Rata – Rata Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	B	CC	80

Evaluasi dan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah :

1. Opini BPK RI terhadap LKPD

Dari data tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel. 3.4
Pelaksanaan Pengawasan
Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Pemeriksaan	Tahun		
		2011	2012	2013
1	Reguler	70	47	19
3	Kasus	-	6	3
4	ADD	151	47	5
5	Review Keuangan	-	-	58
6	Dana BOS	-	-	64

Sumber data : Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Itkab Kukar 2013

Dari hasil pemeriksaan dilapangan, temuan dari Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut terbagi dua katagori temuan yaitu temuan administrasi dan temuan kerugian Negera/Daerah. Dapat dijelaskan disini maksud temuan administrasi adalah Aparatur yang diperiksa tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik mengenai administrasi keuangan, administrasi barang maupun administrasi kepegawaian. Sedangkan temuan kerugian Negara/ Daerah adalah Aparatur yang diperiksa melalaikan kewajibannya khususnya berkaitan dengan keuangan antara lain setoran pajak, retribusi daerah dan lain sebagainya.

Dari data tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 hasil temuan pemeriksian Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel. 3.5
Klasifikasi Hasil Rekomendasi Pemeriksaan
Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Jenis Temuan	Tahun				Keterangan
		2011	2012	2013	%	
1	Administrasi	343	339	27		-
2	Kerugian Negara/Daerah	151	81	49		-
Total Rekomendasi		494	420	76		-

Sumber data : Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Itkab Kukar 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2011 jumlah temuan baik administrasi maupun kerugian negara/daerah semakin meningkat. Ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman Aparatur di Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku belum menunjukkan perbaikan yang signifikan cenderung menurun.

Setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, maka diperlukan memonitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana Aparatur yang diperiksa tersebut telah memenuhi kewajibannya terhadap hasil temuan yang telah disampaikan.

Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini dilakukan sampai sejauh mana ketaatan aparatur yang diperiksa terhadap rekomendasi yang

diberikan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yang tergambar dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Dari data tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 hasil monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat tabel dibawah ini :

*Tabel. 3.6
Hasil Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara
Rekomendasi Yang Telah Diselesaikan*

No	Tahun Pemeriksaan	Rekomendasi Selesai	Sisa Rekomendasi
1	2011	395	493
2	2012	288	95
3	2013	0	88

Sumber data : Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Itkab Kukar 2013.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih ada beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara belum diselesaikan oleh auditan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa temuan yang mengharuskan auditandimaksud untuk melakukan kewajiban setornya yang belum dilaksanakan. Selain itu juga ada beberapa pegawai di SKPD yang bersangkutan ada yang telah mutasi dan pensiun sehingga menyulitkan untuk pemenuhan rekomendasi tersebut.

Selain rekomendasi hasil pemeriksaan yang dimonitoring oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, juga kerugian negara/daerah serta kewajiban kepada negara/daerah yang diwajibkan kepada Aparatur yang diperiksa.

Tabel. 3.7
Kerugian Negara dan Kewajiban Kepada Negara
Dari Hasil Pemeriksaan

No	Tahun	Kerugian Negara	Disetor	Sisa	Kewajiban	Disetor	Sisa
1	2011	1.810.929.515,73	1.428.390.447,23	382.539.068,50	892.488.001,52	752.499.962,52	139.988.039,00
2	2012	1.640.079.927,00	393.410.052,61	1.246.669.874,39	361.885.207,44	113.346.182,00	248.539.025,44
3	2013	141.252.043,04	0,00	141.252.043,04	118.497.800,00	0,00	118.497.800,00
Jumlah		3.592.261.485,77	1.821.800.499,84	1.770.460.985,93	1.372.871.008,96	865.846.144,52	507.024.864,44

Suber data : Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Itkab 2013

Dari data tabel tersebut diatas dilihat bahwa dari tahun 2011 diselesaikan oleh SKPD yang memiliki kewajiban setor terhadap negara/daerah, sedangkan pada temuan pemeriksaan tahun 2012 dan tahun 2013 terkait hasil pemeriksaan oleh Inspektorat masih dalam tahap inventarisasi.

Sampai saat ini masih terdapat kewajiban setor yang harus dimonitoring lebih lanjut sebesar Rp.507.024.864.44,-untuk Kerugian Negara/Daerah dan Kewajiban Setor. Kewajiban setor ini sebagian besar merupakan temuan pemeriksaan terhadap pajak yang belum disetorkan oleh auditan dan kelebihan volume pekerjaan fisik dilapangan.

Namun demikian kegiatan yang dilakukan pada tahun 2012 belum sepenuhnya memberikan kontribusi dalam penilaian BPK. Pada tahun 2013

Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara akan melakukan upaya perbaikan opini laporan keuangan menjadi lebih baik dengan memprogramkan Peningkatan pengawasan Internal dan pelaksanaan kebijakan KDH:

1. Melalui pembinaan terhadap SKPD sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang ditemukan oleh auditor eksternal
2. Melakukan penjaminan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan, SPI, SAP dan Peraturan yang berlaku terhadap laporan keuangan dengan mereviu Laporan Keuangan SKPD maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Prosentase Penetapan Sistem Pengendalian Intern SKPD

Pada tahun 2013 Inpektorat Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penilaian sistem pengendalian intern pemerintah. Program penilaian sistem pengendalian intern SKPD ini dituangkan dalam kegiatan Pemetaan SPIP dan Sosialisasi Perbup SPIP. Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan pemetaan SPIP di SKPD lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adakah kegiatan diagnosis untuk mengetahui kondisi awal penerapan SPIP pada suatu instansi pemerintah guna memperoleh gambaran area yang memerlukan perbaikan (*area of improvement*).

Adapun SKPD yang telah dilakukan pemetaan SPIP sebanyak 12 SKPD. Sumber daya pemetaan SPIP adalah para auditor, P2UPD dan pegawai

Inspektorat Kutai Kartanegara serta di dampingi oleh tim dari BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur.

Untuk kegiatan Sosialisasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013, tidak dilaksanakan. Kegiatan sosialisasi ini hanya sampai pada pengadaan perlengkapan peserta sosialisasi yang berisikan kelengkapan peserta berupa materi dan ATK peserta.

Kegiatan Sosialisasi Perbup SPIP tidak jadi dilaksanakan, dikarenakan kurangnya kesiapan narasumber dari Satgas SPIP Kabupaten dan pihak BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur.

3. Peringkat Evaluasi LPPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tingkat Propinsi Kaltim

Dalam rangka mendukung LPPD yang baik, Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pendampingan/monitoring/evaluasi terhadap LPPD SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam pelaksanaannya, terdapat perubahan nama kegiatan, yang awalnya Evaluasi LPPD Kabupaten Kutai Kartanegara dirubah menjadi Monitoring LPPD SKPD. Kegiatan monitoring LPPD ini dilakukan dengan maksud membantu SKPD dalam menyusun LPPD SKPD sehingga diperoleh hasil yang berkualitas dan akurat dengan dilengkapi data pendukung, sehingga dapat meningkatkan peringkat hasil Evaluasi LPPD Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi "5".

Dari 100 SKPD yang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, kegiatan Monitoring LPPD ini dilakukan terhadap 36 (tiga puluh enam) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dari hasil Evaluasi LPDD Kabupaten Kutai Kartanegara oleh tim EKPD dari Inspektorat Propinsi Kalimantan Timur, perolehan peringkat hasil Evaluasi LPPD Kabupaten Kutai Kartanegara naik menjadi peringkat "2" untuk kategori Kabupaten, LPPD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah peringkat "1".

4. Nilai Rata – Rata Hasil Evaluasi LAKIP SKPD

Evaluasi LAKIP SKDP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dimaksudkan untuk menilai laporan akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari 100 SKPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, telah dilakukan evaluasi LAKIP pada 54 SKPD. Hasil rata – rata kategori evaluasi LAKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah "C".

Selain melakukan kegiatan evaluasi LAKIP SKPD, Inspektorat Kutai Kartanegara juga melakan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi LAKIP SKPD. Maksud dari kegiatan tersebut untuk memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil

evaluasi periode sebelumnya sebagai dasar Evaluasi Lakip oleh Inspektorat Propinsi Kalimantan Timur.

5. Score Nilai Rata – Rata (Kategori) Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hasil penilaian Kemenpan RI terhadap LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2010 sampai dengan 2012 memperoleh penilaian pada kategori "D". Untuk meningkatkan kategori hasil penilaian ini, Inspektorat Kutai Kartanegara melakukan langkah – langkah berupa kegiatan Evaluasi LAKIP SKPD dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi LAKIP SKPD.

Dengan adanya kegiatan Evaluasi LAKIP dan Tindak Lanjut LAKIP pada SKPD, diharapkan SKPD dapat melakukan perbaikan pada LAKIP yang dibuat dan kedepannya proses penyelesaian LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan tepat waktu.

Langkah – langkah yang dilakukan Inspektorat Kutai Kartanegara ternyata sesuai dengan harapan, dimana dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Kemenpan RI terhadap LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mempercepat terbentuknya LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013.

Dari hasil penilaian Kemenpan RI pada tahun 2013, score/kategori skala nasional Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat menjadi "CC".

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program sebagaimana kebijakan dan sasaran kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2013. Alokasi dana tahun 2013 yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Sebesar Rp.32.391.801.787,93.

Selanjutnya sesuai dengan pengukuran capaian kinerja suatu instansi pemerintah perlu adanya penilaian terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan agar diketahui sampai sejauh mana capaian program dan kegiatan tersebut dijalankan dengan dana yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun standar pengukur capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.8
Pengukuran Capaian Kinerja
Program dan Kegiatan

No	Rentang Capaian	Katagori
1	Capaian \geq 100%	Memuaskan
2	85% \leq capaian < 100%	Sangat Baik
3	70% \leq capaian < 85%	Baik
4	55% \leq capaian < 70%	Cukup
5	Capaian \leq 55%	Kurang

Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2013 telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dengan perincian program

sebanyak 7 program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 44 kegiatan setelah APBD Perubahan.

Sesuai dengan tabel diatas pencapaian kerja program dapat disajikan dalam table berikut ini :

Tabel. 3.9
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2013

No	Rentang Capaian	Katagori	Jumlah Program
1	Capaian \geq 100%	Memuaskan	1
2	85% \leq capaian < 100%	Sangat Baik	3
3	70% \leq capaian < 85%	Baik	2
4	55% \leq capaian < 70%	Cukup	-
5	Capaian \leq 55%	Kurang	1
Jumlah Program			7

Kemudian untuk capaian kinerja kegiatan, dimana Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan sebanyak 39 kegiatan antara lain sebagai berikut :

Tabel. 3.10
 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
 Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara
 Tahun 2013

	Program dan Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Hasil (%)
1	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH					
	1	Pelaksanaan Pengawasan Secara Berkala	LHP SKPD	99	85	92 %
	2	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Kasus	20	5	15%
	3	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Rekomendasi	700	245	35 %
	4	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Dokumen	274	260	95 %
	5	Penyelesaian Kasus TP-TGR	Tuntutan	25	1	4 %
	6	Pemeriksaan Pakta Integritas	Laporan	34	0	0.00 %
	7	Evaluasi LPPD dan Pemda	SKPD	50	36	72%
	8	Evaluasi LAKIP SKPD dan Pemda	SKPD	54	54	100 %
	9	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Rekomendasi	100	20	21 %
	10	Pemetaan SPIP	SKPD	12	12	100%
	11	Gelar Pengawasan Hasil-Hasil Pemeriksaan	Peserta	102	102	100 %
	12	Tindak Lanjut Evaluasi Lakip dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara	SKPD	34	36	107 %
	13	Sosialisasi Perbub SPIP	SKPD	31	0	0 %
	14	Pengawasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	SKPD	22	0	0 %
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang	28	16	57 %
	2	Workshop Penilaian Angka Kredit	Orang	30	30	100 %
	3	Sosialisasi Zona Integritas Kab.Kutai Kartanegara	SKPD	99	99	100 %

	4	Sosialisasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD di Lingkungan Pemkab. Kutai Kartanegara	Orang	72	0	0 %
3	Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lembar	300	90	30,86%
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	6	6	100 %
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Buah	72	14	20%
	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	100 %
	5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Item	131	62	47 %
	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Macam	58	77	132 %
	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Macam	17	20	117 %
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Macam	5	5	100 %
	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Eksemplar	2670	2670	100 %
	10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Macam	18	18	100 %
	11	Penyediaan Makan dan Minum	Porsi	10060	10060	100 %
	12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Orang	212	131	62 %
	13	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Pkm	33	33	100 %
	Peningkatan Sarana dan Prasarana					
4	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Item Peralatan	9	8	88 %
	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung	1	1	100 %

	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional	Unit mobil dan motor	10 unit 15 unit	10 unit 15 unit motor	100 %
	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Gedung	1	1	100 %
	5	Pembuatan Buletin Pengawasan Internal	Edisi	12	0	0 %
5	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan					
	1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Orang	85	80	80 %
	2	Pelatihan Pemeriksa SIMDA	Orang	60	60	100 %
	3	Diklat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Orang	65	0	0 %
	4	Sosialisasi dan Bimtek Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Skpd	21	21	100 %
	5	Sosialisasi dan Penyampaian Pajak dan LP2P	Org	140	140	100 %
	6	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Bidang Pengembangan Keahlian Pengawasan	Org	47	47	100 %
6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi					
	1	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik	Software	4	3	75 %
7	Pengembangan Komunikasi, Informasi Manajemen Pengawasan					
	1	Pengelolaan dan Penataan Arsip SKPD	Sistem Aplikasi	1	0	0 %

Sumber : Sub Bag. Penyusunan Program dan Keuangan Tahun 2013

Dari hasil capaian kinerja baik program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013 diatas dapat dijelaskan bahwa masih terdapat beberapa kegiatan yang belum memenuhi harapan yang telah ditetapkan khususnya yang capaian kinerjanya masih

dianggap kurang, sehingga diharapkan ditahun-tahun berikutnya bisa lebih ditingkatkan.

3.3 Kelemahan dan Kekuatan Internal

3.3.1 Kelemahan Internal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintahan Desa tak lepas dari kelemahan internal khususnya sumber daya manusia. Hal ini akan mempengaruhi kinerja dalam pelayanan masyarakat.

Hal tersebut juga terjadi pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dimana kelemahan internal yang dialami adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya tenaga pemeriksa baik auditor maupun P2UPD dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan.
2. Anggaran belanja yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dirasakan belum diserap secara optimal.
3. Sering terlambatnya realisasi anggaran yang mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
4. Waktu pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan sertamonitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masih kurang maksimal, sehingga hasil yang diperoleh dilapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

3.3.2 Kekuatan Internal

Dilihat dari kelemahan internal tersebut diatas, seluruh Aparatur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara telah berkomitmen untuk mewujudkan visinya yaitu terwujudnya pelaksanaan pengawasan yang profesional dalam pelaksanaan Good Governance.

Adapun kekuatan Internal yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Aparatur pemeriksa yang ditetapkan sebagai Pejabat fungsional Auditor maupun P2UPD telah memiliki sertifikasi sebagai Pejabat Fungsional Auditor maupun P2UPD.
2. Anggaran Belanja yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan cukup besar yang digunakan semaksimal mungkin dalam mengawal pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
3. Waktu pelaksanaan pengawasan dan monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sesuai dengan Anggaran Belanja yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Mengintensifkan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan, bimbingan teknis dan pelatihan kantor sendiri (PKS) guna meningkatkan kemampuan sumber daya manusia aparatur sehingga mampu memberikan jasa konsultansi baik kepada SKPD maupun kepada masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Keberhasilan Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian rencana kerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan pada tahun 2013, meliputi 7 Program dan 44 Kegiatan dengan indikator kinerja sasaran yang harus dicapai.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 tersebut, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan hasil memuaskan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan hasil sangat baik, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan hasil baik, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Manajemen Pengawasan tidak dapat dilaksana dengan hasil kurang, kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Hasil capaian kinerja rata-rata kegiatan dalam mewujudkan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dengan katagori rata-rata baik yaitu dikisaran antara $85\% \leq \text{capaian} < 100\%$.

4.2 Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja serta Langkah Antisipatif

Dalam tahun 2013 terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi :

1. Pelaksanaan kegiatan Tidak tepat waktu sebagaimana yang telah dituangkan dalam kerangka acuan kerja kegiatan yang sudah ditetapkan.
2. Jumlah Sumber daya manusia yang mampu melaksanakan dua fungsi sekaligus yakni sebagai aparatur pengawas dan menjadi pelaksana kegiatan tidaklah cukup tersedia.
3. Aparatur pengawas yang notabene sebagai pejabat fungsional belum sepenuhnya memahami fungsi sebagai pemberi peringatan dini dan memberikan jasa konsultasi.

4.3 Strategi Pemecahan Masalah

Melihat dari kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, maka strategi yang dapat diambil dalam pemecahan masalah adalah sebagai berikut :

1. Menjaga konsistensi terhadap KAK yang telah diputuskan bersama antara pelaksana kegiatan dan Pengguna Anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran bisa lebih maksimal dan tepat waktu.
2. Mengintensifkan dan membuat jadwal kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terhadap isu-isu yang strategis yang menjadi titik tolak pelaksanaan pemeriksaan. Mengikutkan sertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan baik fungsional maupun yang lainnya dalam menambah pengetahuan dan keahlian pegawai tersebut dalam meningkatkan produktifitas pegawai Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013, semoga dapat bermanfaat dan dijadikan bahan dalam rangka meningkatkan dan penyempurnaan pelayanan pada seluruh aparatur dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, Januari 2014
 Inspektur
 Kabupaten Kutai Kartanegara,

Drs. H. Machmudan, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19710305 199202 1 002

No.	N a m a	Jabatan	Paraf
1.	Abdullah Pannusu, SH, M.Si	Sekretaris	
2.	Muriyanto, S.STP	Kasubag. Penyusunan Prog. & Keu.	

RENCANA KINERJA TAHUNAN

SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 TAHUN : 2013

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Opini BPK RI terhadap LKPD	WDP
		Prosentase Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP yang sesuai dengan rekomendasi.	80%
		Prosentase Penerapan sistem pengendalian intern SKPD	10%
3	Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawas	1. Jumlah Auditor yang bersertifikasi	30
		2. Jumlah P2UPD yang bersertifikasi	18
		3. Jumlah aparatur pengawas yang mempunyai kompetensi	8
4	Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan	1. Jumlah sarana dan prasarana IT	80
		2. Jumlah peralatan uji untuk pemeriksaan	80
		3. Jumlah kelengkapan penunjang pengawasan lainnya	80
6	Meningkatnya peran serta stakeholder/ masyarakat dalam pengawasan	1. Prosentase pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat	30